

Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada Kab. Luwu

(Studi Kasus Kantor Inspektorat Kab.Luwu)

Rahmawati¹
Andika Rusli²

No. HP 081355428082¹, 085242438738²

¹Alamat Korespondensi: Jl. Pantai Songka II Palopo

Email: rahmawati345@yahoo.co.id

Abstrak

Salah satu hal yang dapat mewujudkan *good corporate governance* yaitu dilihat dari kinerja dari setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, baik kinerja dalam hal pencapaian tujuan kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, pencapaian kinerja secara efisien, efektif, dan ekonomis, serta kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam melayani kepentingan masyarakat, maka perlu dilakukan audit kinerja

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Audit Internal terhadap penerapan *good corporate governance* pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Auditor Internal pemerintah daerah yang ada di kantor Inspektorat kabupaten Luwu. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang sesuai untuk diajukan kepada para responden Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi linier sederhana yang diolah dengan software SPSS versi 18.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya audit internal akan mendorong tercapainya penerapan *Good corporate Governance* dilingkup Inspektorat sehingga nanti secara garis besar nantinya akan mendorong tatakelola keuangan dilingkup pemerintah kabupaten akan berjalan dengan baik, meskipun banyak factor lain yang akan mendukung yang belum diteliti secara mendalam seperti karakteristik auditornya itu sendiri, etika auditor dal faktor lainnya.

Keyword: *Audit Internal, Auditor Internal, good corporate governance*

Pendahuluan

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang dilakukan setelah dikeluarkannya

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menyebabkan terjadinya pengalihan sebagian wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (UU No. 32/2004) tentang Pemerintah Daerah menegaskan kewenangan Pemda untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam pengalihan wewenang tersebut oleh pemerintah daerah yang terdapat dalam tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan (Prajogo,2001). Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Suatu pemerintahan yang baik harus menjalankan roda pemerintahannya secara terbuka agar semua pihak yang berkepentingan dalam pemerintahan tersebut dapat berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan juga harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Dyah Setyaningrum (2012:2) akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah masih dalam taraf munculnya kesadaran pentingnya pertanggungjawaban, namun hal ini perlu dihargai sebagai bentuk kemajuan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Belum adanya kesadaran pemerintah untuk mempertanggung jawabkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah serta maraknya kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi data akuntansi di instansi pemerintahan membuat resah masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik dan pentingnya suatu informasi akuntansi. Masyarakat menyadari adanya ketidakpuasan pengelolaan

kekayaan negara yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja.

Terjadinya manipulasi atau kecurangan (*fraud*) data akuntansi pemerintah daerah yang banyak dilakukan oleh orang-orang dalam instansi pemerintah daerah menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Maraknya kasus-kasus demikian menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak terutama terhadap tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal *good corporate governance* yang sekali lagi mengakibatkan terungkapnya kenyataan bahwa mekanisme *good corporate governance* yang baik belum diterapkan dalam pemerintah daerah. Peran Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem pemantauan, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur perkembangan yang dicapai Pemda.

Menurut Mardiasmo (2005: 189) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun dengan adanya otonomi daerah, informasi dan hasil kinerja pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu belum sepenuhnya merupakan hasil yang terbaik dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan peran dari auditor dalam melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah melalui prosedur yang telah ditentukan.

Untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam melayani kepentingan masyarakat, maka perlu dilakukan audit kinerja. Audit Kinerja merupakan suatu audit yang objektif dan sistematis terhadap bukti-bukti untuk dapat melaksanakan penilaian secara independen atas kinerja suatu organisasi/perusahaan (Fibrianto Wahyu Nugroho, 2005:2). Audit Kinerja bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengaudit dan mendorong pencapaian tujuan secara efektif, efisien, dan ekonomis, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang

bertanggung jawab (Deputi Bidang Akuntan Negara, 2001: 2).

Penyelenggaraan audit kinerja instansi pemerintah daerah agar maksud dan tujuannya sesuai dengan kebutuhan bagi pihak yang membutuhkan dan informasi yang dibutuhkan secara objektif, biasanya dilakukan oleh pemeriksa intern pemerintah daerah dalam hal ini Inspektorat sebagai pengawas intern pemerintah daerah. Inspektorat merupakan instansi pemerintah daerah yang melakukan pemeriksaan dan mengawal kinerja Pemda tentang pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menciptakan *good corporate governance* yang baik.

Penelitian-penelitian yang terkait dengan faktor-faktor terciptanya *good governance* salah satunya pernah dilakukan oleh Dr. Leny Nofianti (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada dimensi audit kinerja atau audit operasional variabel pelaksanaan audit internal sektor publik yang diteliti, menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kinerja/operasional masih harus ditingkatkan hampir di semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Provinsi Riau. Hasil yang diperoleh pada pelaksanaan audit kinerja/operasional bukan semata-mata kebenaran formal tapi adalah manfaatnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan akuntabilitas publik dalam kerangka mewujudkan *good governance*.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Latifa Agustin (2010) menyatakan bahwa kompetensi audit dan independensi audit berpengaruh signifikan terhadap efektivitas peran audit internal dalam mewujudkan *good corporate governance*. Sedangkan menurut Supriadi dkk (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good governance* belum terlaksana sepenuhnya dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan - Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah. Dalam proses penyusunan RKA dan pelaksanaan kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa rencana kerja dan anggaran yang telah disusun tidak sepenuhnya dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja program/kegiatan.

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmini (2013) menyatakan bahwa kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan *good governance* sudah berjalan baik hal itu bisa dilihat dari produktivitas yang didukung oleh kemampuan pegawai dalam mengatasi kesulitan dalam

pelayanan yang cukup memuaskan masyarakat, kualitas pelayanan yang dimana pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan efisien dan responsivitas pegawai yang tanggap dalam mengatasi keluhan-keluhan masyarakat. Namun menurut Rusmini terdapat faktor penghambat mewujudkan *good governance* diantaranya ketidak disiplin pegawai. Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Fibrianto Wahyu Nugroho (2005:86) menyatakan bahwa BPKP melaksanakan Audit Kinerja secara independen untuk menilai keberhasilan atas kinerja BUMN/BUMD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sehingga dapat membantu manajemen auditan dalam mendorong pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien, dan efektif, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Mengacu dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dalam penelitian ini peneliti akhirnya menarik kesimpulan bahwa salah satu hal yang dapat mewujudkan *good corporate governance* yaitu dilihat dari kinerja dari setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, baik kinerja dalam hal pencapaian tujuan kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, pencapaian kinerja secara efisien, efektif, dan ekonomis, serta kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan untuk mengetahui apakah kinerja pemerintah sudah baik atau belum perlu dilakukannya audit kinerja oleh auditor internal pemerintahan terkait apakah prinsip-prinsip yang terdapat dalam *good corporate governance* telah diterapkan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis akan menganalisis keefektifan penyelenggaraan audit kinerja untuk mewujudkan *good corporate governance* pada pemerintah daerah yang dilakukan oleh auditor internal dalam hal ini Inspektorat pemerintah daerah Kabupaten Luwu, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyajikannya dengan judul **“Pengaruh Audit Kinerja terhadap penerapan Good Corporate Governance Kabupaten Luwu”**

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu peneliti mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan kuesioner.

Dimana teknik pengumpulan informasi dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang sesuai untuk diajukan kepada para responden (masri dan Sofyan, 2005). Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh auditor internal pemerintah yang ada di Kantor Inspektorat Kabupaten Luwu.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana dengan alat analisis *software* SPSS versi 18. Persamaan regresi linear sederhana ini mengandung makna bahwa dalam suatu persamaan regresi terdapat satu variabel dependent dan satu variabel independent. Persamaan regresi linear sederhana dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b X$$

Dimana :

Y = *Good Governance*

X = Audit Internal

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

Hasil dan Pembahasan

Variabel (x) Audit Internal

Deskripsi Data Variabel Audit Keuangan

Tabel 1
Deskripsi Jawaban Variabel variabel Keuangan

Item	STS	TS	N	S	SS	Total
1	0	1	0	11	2	14
2	0	0	3	4	7	14
Persentase	0,00	0,5	1,5	7,5	4,5	14

Data primer setelah diolah, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk semua item pernyataan, 11% responden menjawab setuju bahwa penyajian laporan keuangan telah memadai dan tepat waktu dan 4% responden menjawab setuju bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan telah dilaksanakan oleh audit independen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tersebut.

Jadi berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7,5% responden-

menjawab setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu, 4,5% reponden menjawab sangat setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu, 1,5% reponden menjawab netral adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu dan 0,5 reponden menjawab tidak setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu.

Tabel 2
Deskripsi Jawaban Variabel Audit Kinerja

Item	STS	TS	N	S	SS	Total
1	0	0	0	10	4	14
2	0	1	1	8	4	14
3	0	1	3	8	2	14
Persentase	0,7	0,5	1,3	8	3,3	14

Data primer setelah diolah, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk semua item pernyataan, responden menjawab setuju yang masing-masing persentasenya berturut-turut yaitu 10% responden menjawab setuju bahwa prosedur operasi standar dan metode yang diterapkan suatu organisasi-

bertujuan untuk mengevaluasi efisien setiap bagian organisasi, 8% responden menjawab setuju bahwa prosedur operasi standar dan metode yang diterapkan suatu organisasi bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan keekonomisan setiap bagian organisasi, dan 8% responden menjawab

setuju bahwa auditor telah membandingkan output yang telah dicapai pada periode bersangkutan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, kinerja tahun-tahun sebelumnya dan unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda.

Jadi berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 8% reponden menjawab setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu, 3,3% reponden-

menjawab sangat setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu, 1,3% reponden menjawab netral adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu dan 0,5 reponden menjawab tidak setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu.

Deskripsi Data Variabel Audit Kepatuhan

Tabel 3

Deskripsi Jawaban Variabel Audit Kepatuhan

Item	STS	TS	N	S	SS	Total
1	0	0	3	6	5	14
2	0	0	1	8	5	14
Persentase	0,00	0,00	2	7	5	14

Data primer setelah diolah, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk semua item pernyataan, responden menjawab setuju yang masing-masing persentasenya berturut-turut yaitu 6% responden menjawab setuju bahwa auditor internal mengevaluasi kesesuaian aktivitas dengan hukum, regulasi dan standar yang berlaku, 8% responden menjawab setuju bahwa auditor internal mengevaluasi program dan kegiatan operasi apakah telah berfungsi sebagaimana mestinya dan memberi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan .

Jadi berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7% reponden menjawab setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate*

governance Kabupaten Luwu, 5% reponden menjawab sangat setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu dan 2% reponden menjawab netral adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu.

Deskripsi Data Variabel Audit Sistem Informasi

Tabel 4
Deskripsi Jawaban Variabel Audit Sistem

Item	STS	TS	N	S	SS	Total
1	0	1	2	8	3	14
2	0	3	4	5	2	14
3	1	0	3	7	3	14
4	2	0	0	8	4	14
Persentase	0,75	1	2,25	7	3	14

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk semua item pernyataan, responden menjawab setuju yang masing-masing persentasenya berturut-turut yaitu 8% responden menjawab setuju bahwa kegiatan audit internal di pemda Bapak/Ibu/Saudara adalah review terhadap keefektifan sistem informasi dan memastikan bahwa sistem tersebut berjalan sebagaimana yang diharapkan, 5% responden menjawab setuju bahwa pelaksanaan kegiatan audit internal terhadap sistem komputer yang digunakan adalah untuk melindungi aset milik organisasi, 7% responden menjawab setuju bahwa pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang digunakan mampu menjaga integritas data dan 8% responden menjawab setuju bahwa audit terhadap sistem komputer yang digunakan dapat membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien.

Jadi berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7% responden menjawab setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu, 3% responden-

menjawab sangat setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu, 2,25% responden menjawab netral adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu, 1% responden menjawab tidak setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu dan 0,75% responden menjawab sangat tidak setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu.

Variabel (Y) Penerapan *Good Corporate Governance*

Tabel 5
Deskripsi Jawaban Variabel Penerapan *Good corporate Governance*

Item	STS	TS	N	S	SS	Total
1	0	2	5	4	3	14
2	2	1	2	7	2	14
3	0	2	2	6	4	14
4	0	1	0	10	3	14
5	0	0	2	8	4	14
6	0	0	3	7	4	14
Persentase	0,33	1	2,33	7	3,33	14

Data primer setelah diolah, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk semua item pernyataan, responden menjawab setuju yang masing-masing persentasenya berturut-turut yaitu 4% responden menjawab setuju bahwa partisipasi: pemerintah Kabupaten Luwu bersama instansi lain telah melaksanakan fungsinya secara seimbang dan partisipatif, 7% responden menjawab setuju bahwa daya tanggap: pemerintah Kabupaten Luwu telah berperan meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali, 6% responden menjawab setuju bahwa wawasan kedepan: pembangunan daerah berdasarkan ciri dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya, 10% responden menjawab setuju bahwa akuntabilitas: Pemerintah Kabupaten Luwu telah meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas,

8% responden menjawab setuju bahwa efektifitas dan efisien: Pemerintah Kabupaten Luwu telah menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan tanggung jawab dan 7% responden menjawab setuju bahwa profesionalisme: Pemerintah Kabupaten Luwu telah meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7% responden menjawab setuju bahwa adanya penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah pernyataan pada kuesioner yang telah diadarkan dapat mengukur variabel yang akan diukur. Untuk mengetahui validitas

pernyataan dari setiap variabel, maka digunakan correlation bivariate dengan kriteria:

1. Jika sig. (2-tailed) < 0,05= valid
2. Jika sig . (2-tailed)> 0,05= tidak valid

Audit Internal (x)

Tabel 6
Hasil Uji Validitas

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Significant</i>	Keterangan
Audit Internal 1	0,695**	0,006	Valid
Audit Internal 2	0,608**	0,021	Valid
Audit Internal 3	0,555**	0,040	Valid
Audit Internal 4	0,586**	0,028	Valid
Audit Internal 5	0,784**	0,001	Valid
Audit Internal 6	0,842**	0,000	Valid
Audit Internal 7	0,689**	0,006	Valid
Audit Internal 8	0,818**	0,000	Valid
Audit Internal 9	0,871**	0,000	Valid
Audit Internal 10	0,763**	0,002	Valid
Audit Internal 11	0,693**	0,006	Valid

Data primer setelah diolah, 2014

Good Corporate Governance (Y)

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Variabel Good Corporate Governance

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Significant</i>	Keterangan
Good Corporate Governance 1	0,754**	0,002	Valid
Good Corporate Governance 2	0,914**	0,000	Valid
Good Corporate Governance 3	0,805**	0,001	Valid
Good Corporate Governance 4	0,595**	0,025	Valid
Good Corporate Governance 5	0,889**	0,000	Valid
Good Corporate Governance 6	0,835**	0,000	Valid

Data primer setelah diolah, 2014

Berdasarkan tabel uji validitas diatas variabel audit internal yang terdiri dari audit keuangan, audit kinerja, audit kepatuhan, audit sistem informasi dan variabel *penerapan good corporate governance* (Y) di atas, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan untuk masing-masing variabel dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi untuk setiap pernyataan pada setiap variabel $< 0,05$ maka pernyataan dikatakan valid.

Sesuai dengan tujuan dilakukannya uji validitas adalah untuk melihat seberapa besar kemampuan pernyataan dapat mengetahui jawaban responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang diajukan oleh peneliti

dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden dapat dijadikan sebagai alat ukur yang tepat.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian dan untuk mengukur apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas setiap variabel yaitu metode *Alpha Cronbach*. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai *alpha* $> 0,60$.

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien <i>Alpha</i>	Keterangan
Audit Internal	0,899	Reliabel
Good Corporate Governance	0,875	Reliabel

Data primer setelah diolah, 2014

Dari hasil uji reliabilitas di atas, semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel atau handal karena menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien *Alpha* lebih dari 0,60 sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang handal atau dapat dipercaya.

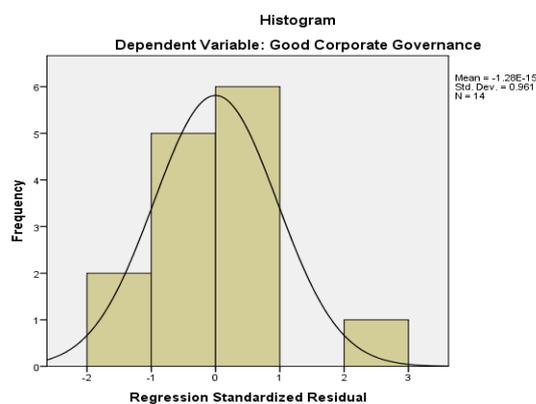
Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau

tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah grafik histogram dan kurva penyebaran P-plot.

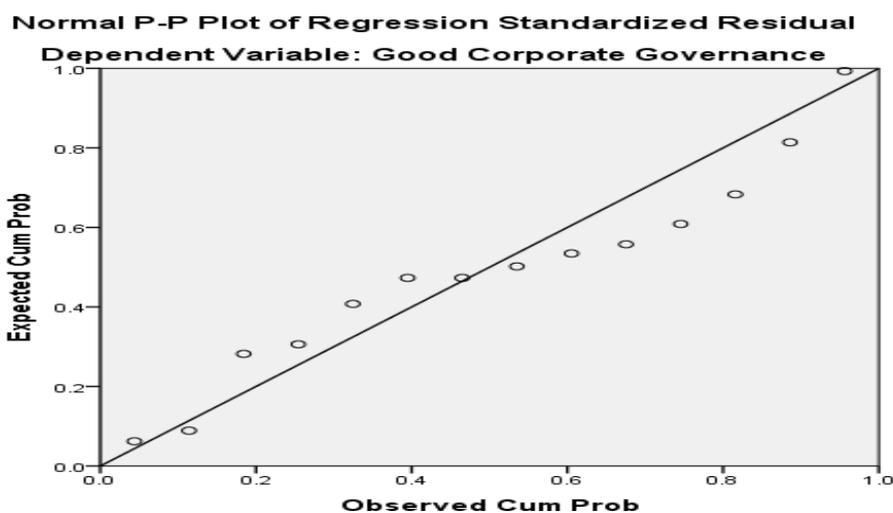
Gambar 1: Grafik Histogram



Sumber: Output SPSS 21.0, 2014

Dengan melihat grafik histogram, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang mendekati normal, hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal.

Gambar 2: Normal Probability plot



Sumber: Output SPSS 21.0, 2014

Berdasarkan tampilan grafik P-Plot (gambar 4.2) dapat disimpulkan bahwa terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Salah satu Metode yang di gunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, yaitu dengan melihat

Akan tetapi hasil dari grafik histogram ini tidak terlalu akurat apalagi ketika jumlah sampel yang digunakan kecil.

Metode lain yang dapat memberikan hasil untuk melihat apakah data terdistribusi normal adalah *normal probability plot*.

tolerance value atau nilai VIF (*Variant Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance value* dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas yang lainnya.

Tabel 9: Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Audit Internal	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Good Corporate Governance

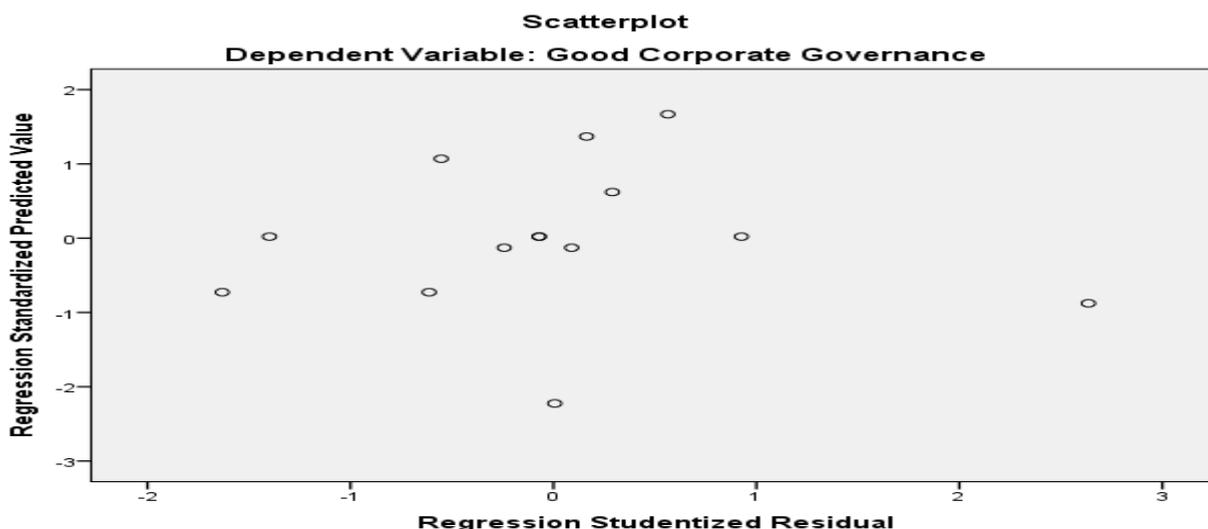
Sumber: Output SPSS 21.0, 2014

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, model regresi yang diajukan untuk variabel independen semuanya terbebas dari multikolinearitas. Ini terlihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF) memiliki VIF tidak lebih dari 10 dan *tolerance value* > 0,10, maka dapat dinyatakan model regresi linear sederhana terbebas dari asumsi multikolinearitas dan variabel independen dapat digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penerapan *good corporate governance*

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2009:125). Untuk menguji ada tidaknya masalah heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat apakah terdapat pola tertentu pada grafik *scatterplot* berikut ini:

Gambar 3: Diagram Scatterplop



Sumber: Output SPSS 21.0, 2014

Dari tampilan output SPSS grafik *scatterplot* terlihat bahwa data tersebar secara acak tanpa membentuk suatu pola tertentu serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, ini membuktikan tidak terjadi heterokedastisitas.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini terdapat perbedaan varians dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Pengujian Hipotesis

Uji regresi Linear Sederhana

Uji regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variable dependen. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variable dependen secara parsial dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda.

Tabel 10: Hasil Analisis Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	.336	.959
1 Audit Internal	.883	.238

a. Dependent Variable: Good Corporate Governance

Sumber: Output SPSS 21.0, 2014

Berdasarkan tabel di atas dengan melihat kolom *unstandardized Coefficients* maka diperoleh model persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = 0,336 + 0,883X$$

Dari hasil tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dari persamaan regresi di atas, konstanta (a) sebesar 1,047 artinya jika audit internal (audit keuangan, audit kinerja, audit kepatuhan,

audit sistem informasi) nilainya tetap atau sama dengan nol, maka akuntabilitas keuangan (Y) nilai skornya sebesar 2,047

- b. Nilai koefisien audit internal sebesar 0, 883 berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan audit keuangan satu satuan maka variabel penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu sebesar 0,883 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain tetap.

Koefisien Determinasi (R²)

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen, yaitu audit keuangan, audit kinerja, audit kepatuhan dan audit sitem informasi terhadap penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu. Hasil koefisien determinasi dapat diliat pada kolom *adjusted R square*, yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 11

Kofisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.731 ^a	.535	.496	.52078

a. Predictors: (Constant), Audit Internal

b. Dependent Variable: Good Corporate Governance

Sumber: Output SPSS 21.0, 2014

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien *adjusted R square* adalah sebesar 0,496 atau 49,6%. Maka disimpulkan bahwa variabel dependen yaitu penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu (Y) dipengaruhi oleh audit internal (audit keuangan, audit kinerja, audit kepatuhan, audit sistem informasi) sebesar 49,6%. Sedangkan sisanya 50,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Angka koefisien korelasi (R) pada tabel 4.11 sebesar 0,731 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah kuat karena memiliki nilai koefisien korelasi di atas 0,5.

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian regresi secara parsial (uji t) bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) dari variabel dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. Jika *p-value* lebih kecil dari 0,05 maka ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 12
Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.336	.959		.350	.732
Audit Internal	.883	.238	.731	3.712	.003

a. Dependent Variable: Good Corporate Governance
 Sumber: Output SPSS 21.0, 2014

Hasil pengujian secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen yang dilakukan dengan uji t (tabel 4.20) dengan membandikan nilai probabilitas (0,003) lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel audit internal berpengaruh signifikan terhadap *good corporate governance* Kab.Luwu.

Dari hasil penelitian di atas bahwa dengan adanya audit internal akan mendorong tercapainya-

penerapan *Good corporate Governance* dilingkup Inspektorat sehingga nanti secara garis besar nantinya akan mendorong tatakelola keuangan dilingkup pemerintah kabupaten akan berjalan dengan baik, meskipun banyak factor lain yang akan mendukung yang belum diteliti secara mendalam seperti karakteristik auditornya itu sendiri, etika auditor dal faktor lainnya.

Penelitian ini sesuai dengan teori (Prajogo,2001). Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Suatu pemerintahan yang baik harus menjalankan roda pemerintahannya secara terbuka agar semua pihak yang berkepentingan dalam pemerintahan tersebut dapat berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan juga harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Dyah Setyaningrum (2012:2) akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah masih dalam taraf munculnya kesadaran pentingnya pertanggungjawaban, namun hal ini perlu dihargai sebagai bentuk kemajuan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Belum adanya kesadaran pemerintah untuk mempertanggung jawabkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah serta maraknya kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi data akuntansi di instansi pemerintahan membuat resah masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik dan pentingnya suatu informasi akuntansi. Masyarakat menyadari adanya ketidakpuasan pengelolaan kekayaan negara yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja.

Menurut Mardiasmo (2005: 189) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun dengan adanya otonomi daerah, informasi dan hasil kinerja pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu belum sepenuhnya merupakan hasil yang terbaik dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan peran dari auditor dalam melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah melalui prosedur yang telah ditentukan.

Untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam melayani kepentingan masyarakat, maka perlu dilakukan audit kinerja. Audit Kinerja merupakan suatu audit yang objektif dan sistematis terhadap bukti-bukti untuk dapat melaksanakan penilaian secara independen atas kinerja suatu organisasi/perusahaan (Fibrianto Wahyu Nugroho, 2005:2). Audit Kinerja bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengaudit dan mendorong pencapaian tujuan secara efektif, efisien, dan ekonomis, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab (Deputi Bidang Akuntan Negara, 2001: 2).

Penyelenggaraan audit kinerja instansi pemerintah daerah agar maksud dan tujuannya sesuai dengan kebutuhan bagi pihak yang membutuhkan dan informasi yang dibutuhkan secara objektif, biasanya dilakukan oleh pemeriksa intern pemerintah daerah dalam hal ini Inspektorat sebagai pengawas intern pemerintah daerah. Inspektorat merupakan instansi pemerintah daerah yang melakukan pemeriksaan dan mengawal kinerja Pemda tentang pengelolaan keuangan

daerah yang bertujuan untuk menciptakan *good corporate governance* yang baik.

Penelitian-penelitian yang terkait dengan faktor-faktor terciptanya *good governance* salah satunya pernah dilakukan oleh Dr. Leny Nofianti (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada dimensi audit kinerja atau audit operasional variabel pelaksanaan audit internal sektor publik yang diteliti, menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kinerja/operasional masih harus ditingkatkan hampir di semua SKPD.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Latifa Agustin (2010) menyatakan bahwa kompetensi audit dan independensi audit berpengaruh signifikan terhadap efektivitas peran audit internal dalam mewujudkan *good corporate governance*. Sedangkan menurut Supriadi dkk (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good governance* belum terlaksana sepenuhnya dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-

pemerintahan - Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah. Dalam proses penyusunan RKA dan pelaksanaan kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa rencana kerja dan anggaran yang telah disusun tidak sepenuhnya dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja program/kegiatan.

Rencana dan Tahapan Berikutnya

Penelitian yang kami lakukan ini telah selesai namun luaran hasil penelitian ini yang berupa jurnal ilmiah masih dalam proses penerbitan. Selain itu tahapan diseminasi serta seminar hasil penelitian secara internal juga telah dilakukan. Selain itu penulis akan menyampaikan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah kabupaten Luwu sehingga menjadi referensi ilmiah untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya audit internal di kabupaten Luwu.

Tabel 13
Rencana Tahapan Berikutnya

No.	Kegiatan	2014			
		Agustus	September	Oktober	November
1	Diseminasi internal hasil penelitian				
2	Persentasi Laporan Kemajuan				
4	Proses Pembuatan Jurnal Publikasi jurnal Penelitian				
5	Laporan Hasil				

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penelitian diatas bahwa dengan adanya audit internal akan mendorong tercapainya penerapan *Good corporate Governance* dilingkup Inspektorat sehingga nanti secara garis besar nantinya akan mendorong tatakelola keuangan dilingkup pemerintah kabupaten akan berjalan dengan baik, meskipun banyak factor lain yang akan mendukung yang belum diteliti secara mendalam seperti karakteristik auditornya itu sendiri, etika auditor dal faktor lainnya.

Penelitian ini sesuai dengan teori (Prajogo,2001). Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Suatu pemerintahan yang baik harus menjalankan roda pemerintahannya secara terbuka agar semua pihak yang berkepentingan dalam pemerintahan tersebut dapat berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan juga harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Dyah Setyaningrum (2012:2) akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah masih dalam taraf munculnya kesadaran pentingnya pertanggungjawaban, namun hal ini perlu dihargai sebagai bentuk kemajuan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Belum adanya kesadaran pemerintah untuk mempertanggung jawabkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah serta maraknya kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi data akuntansi di instansi pemerintahan membuat resah masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik dan

pentingnya suatu informasi akuntansi. Masyarakat menyadari adanya ketidakpuasaan pengelolaan kekayaan negara yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja.

Menurut Mardiasmo (2005: 189) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun dengan adanya otonomi daerah, informasi dan hasil kinerja pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu belum sepenuhnya merupakan hasil yang terbaik dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan peran dari auditor dalam melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah melalui prosedur yang telah ditentukan.

Untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam melayani kepentingan masyarakat, maka perlu dilakukan audit kinerja. Audit Kinerja merupakan suatu audit yang objektif dan sistematis terhadap bukti-bukti untuk dapat melaksanakan penilaian secara independen atas kinerja suatu organisasi/perusahaan (Fibrianto Wahyu Nugroho, 2005:2). Audit Kinerja bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengaudit dan mendorong pencapaian tujuan secara efektif, efisien, dan ekonomis, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang

bertanggung jawab (Deputi Bidang Akuntan Negara, 2001: 2).

Penyelenggaraan audit kinerja instansi pemerintah daerah agar maksud dan tujuannya sesuai dengan kebutuhan bagi pihak yang membutuhkan dan informasi yang dibutuhkan secara objektif, biasanya dilakukan oleh pemeriksa intern pemerintah daerah dalam hal ini Inspektorat sebagai pengawas intern pemerintah daerah. Inspektorat merupakan instansi pemerintah daerah yang melakukan pemeriksaan dan mengawal kinerja Pemda tentang pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menciptakan *good corporate governance* yang baik.

Penelitian-penelitian yang terkait dengan faktor-faktor terciptanya *good governance* salah satunya pernah dilakukan oleh Dr. Leny Nofianti (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada dimensi audit kinerja atau audit operasional variabel pelaksanaan audit internal sektor publik yang diteliti, menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kinerja/operasional masih harus ditingkatkan hampir di semua SKPD.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Latifa Agustin (2010) menyatakan bahwa kompetensi audit dan independensi audit berpengaruh signifikan terhadap efektivitas peran audit internal dalam mewujudkan *good corporate governance*. Sedangkan menurut Supriadi dkk (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good governance* belum terlaksana sepenuhnya dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan - Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah. Dalam proses penyusunan RKA dan pelaksanaan

kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa rencana kerja dan anggaran yang telah disusun tidak sepenuhnya dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja program/kegiatan.

Daftar Pustaka

- Agustin, Latifa.2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Audit Internal Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.
- Arens, A.A., & Loebbecke, James K. 2003. *Auditing* :Pendekatan terpadu buku 1 & 2, (edisi ke 30), Alih bahasa Jusuf, A.A. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga. Jakarta
- BPKP.2001. *Pedoman Audit Kinerja BUMN/D*. Deputi Bidang Akuntan Negara. BPKP. Jakarta.
- BPKP. 2003. *Profil BPKP*. BPKP . Jakarta.
- Efendy, Muh. Taufik, 2010, Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi auditor terhadap Kualitas Audit Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo). Tesis Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, Tidak Dipublikasikan.
- F.Messier, William dan Margareth Boh. 2003. *Auditing and Assurance: A Systematic Approach*. Edisi 3. McGraw-Hill. USA.
- Gondodiyoto, Sanyoto.2007. *Audit Sistem Informasi: Pendekatan CobIT*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Halim, Abdul & Muh.Syam Kusufi.2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta

- Howard, Leslie R. 2002. *Principles Of Auditing*. Jakarta.
- Kohler, Erick L. 2010. *Accounting For Management*. Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing)
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Andi Publisher. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mulyadi. 2002. Auditing Edisi Ke-6, Buku 1. Penerbit Salemba Empat.
- Nofianti, Leny. 2012. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Mewujudkan *Good Governance*. Berita Riaupos. Riau.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. Fokus Media. Jakarta
- Prajogo. 2001. Perspektif Pemeriksa terhadap Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Departemen Akuntan Sektor Publik Ikatan Akuntan Indonesia. Vol.02 No.02. Agustus. pp. 1-8.
- Rusmini. 2013. Kinerja Pegawai Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance* Di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir. Skripsi Universitas Mulawarman. Medan.
- Sedarmayanti. 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung : Refika Aditama.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Method For Business*. Buku 1 dan 2. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyaningrum, Dyah. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK-RI. Skripsi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sukrisno, Agoes. (2002). *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) Oleh Kantor Akuntan Publik Jilid I edisi 3*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Supriadi, Sulkarnaen, Rusdiono. 2012. Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Tesis Universitas Tanjungputa Pontianak. Pontianak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Wahyu Nugroho, Fibrianto. 2005. Prosedur Pelaksanaan Audit Kinerja Pada BUMN/BUMD Di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. Skripsi Universitas Semarang. Semarang.